

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan pendapatan daerah yang perlu ditingkatkan. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah disarankan untuk berusaha lebih keras dalam meningkatkan PAD melalui sektor pajak, retribusi, dan penerimaan daerah lainnya. PAD yang semakin meningkat akan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai operasi pemerintahan dan pembangunan daerah, dikarenakan banyak daerah yang masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Sebagai daerah otonom, harus memiliki kemampuan menggali dan mengelola sumber daya yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat. Pendapatan asli daerah memiliki 4 sumber, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Undang-undang tersebut merupakan pemberian kewenangan lebih besar oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola semua urusan pemerintah daerah. Mulai dari perencanaan sumber daya yang dapat digunakan untuk membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi sumber daya tersebut. Tujuan dari undang-undang ini adalah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Menurut (Sidik, 2002) pajak daerah dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan penghasilan paling banyak yang dihasilkan rata-rata pada suatu daerah khususnya Kabupaten Sleman. Pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mulai tahun 2010 ditetapkan menjadi pajak daerah.

Pajak bumi dan bangunan P2 tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp83 miliar dengan SPPT PBB P2 sebanyak 627.729 lembar, namun realisasi pembayarannya sebesar Rp64 miliar dengan SPPT PBB P2 terbayar sebanyak 522.850 lembar atau sebanyak 81,69%. Banyak masyarakat yang belum sadar akan pembayaran pajak kepada pemerintah atau mengesampingkan karena merasa pajak bukan hal utama untuk keberlangsungan hidupnya. Mungkin juga karena pemerintah kurang dalam memperhatikan dan kurang sosialisasi pentingnya pembayaran pajak untuk daerah.

Meskipun begitu semakin banyaknya hotel, restoran, cafe, dan pusat perbelanjaan yang berkembang pesat di daerah Kabupaten Sleman membantu menghasilkan pajak yang semakin banyak pula. Pajak hotel dan BPHTB merupakan perolehan pajak daerah yang rata-rata menghasilkan pendapatan cukup banyak dibandingkan pajak daerah yang lain. Pada tahun 2023 pajak hotel mencapai Rp138.500.000.000 dan BPHTB mencapai Rp222.000.000.000.

Sedangkan retribusi pada tahun 2019 mengalami peningkatan realisasinya sebesar Rp57.632.637.863 namun tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp40.971.519.904, walaupun mengalami penurunan tetapi realisasinya selalu melebihi anggaran yang ditentukan meskipun tidak sebanyak pajak daerah. Penurunan tersebut terjadi kemungkinan dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan wisata, pedagang kaki lima, jasa pelayanan umum, pasar atau toko, dan lain-lain tidak beroperasi akibat pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat. Setelah dilakukan vaksinasi, masyarakat mulai beraktivitas kembali dengan menerapkan protokol kesehatan, dan mulai terlihat geliat ekonomi. Sehingga pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, yaitu tumbuh sebesar 2,11%.

Tahun 2017 sampai 2023 mencakup dinamika yang penting, termasuk adanya pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, khususnya pada penerimaan daerah. Dalam kurun waktu tersebut Kabupaten Sleman mengalami berbagai perkembangan ekonomi, perubahan kebijakan, serta tantangan eksternal yang turut mempengaruhi kinerja pendapatan asli daerah (PAD).

Pada awal periode capaian PAD menunjukkan kecenderungan positif seiring meningkatnya aktivitas ekonomi daerah dan optimalisasi pengelolaan potensi lokal. Namun pada tahun 2019 hingga 2021 atau pertengahan periode, menghadapi tantangan dampak dari pandemi Covid-19, mengakibatkan kondisi ekonomi terguncang bahkan kurang stabil. Terjadinya perubahan situasi tersebut yang menuntut Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melakukan penyesuaian dalam strategi pengelolaan keuangan.

Dengan menganalisis data dalam rentang waktu yang cukup panjang, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tren, tantangan dan efektifitas pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik menyusun Tugas Akhir dengan judul “**Analisis Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Periode 2017-2023**”.

B. Cakupan Pembahasan Tugas Akhir

Berdasarkan atas penjelasan latar belakang, maka kajian Tugas Akhir ini adalah mengenai realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman periode 2017-2023. Dan berfokus pada, sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.
2. Tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.
3. Varians pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.
4. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.

C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

1. Mengetahui tingkat efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.
2. Mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.
3. Mengetahui varians pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.
4. Mengetahui berapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2017-2023.

D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis
Penelitian ini untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan dalam studi di Politeknik YKPN Yogyakarta, memberikan pengalaman dalam mengkaji serta meningkatkan kemampuan penulis menganalisis data keuangan publik.
2. Manfaat bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, dapat menjadi pembanding data dengan daerah lain atau tahun yang berbeda.
3. Manfaat bagi pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana pemerintah mengelola dana publik, memberikan gambaran objektif bagi masyarakat awam pengelolaan APBD.